

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2015 dapat diselesaikan. LAKIP Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 dan sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015.

LAKIP yang disampaikan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan merupakan hasil kerjasama pelaksana kegiatan di lingkup Bappeda Provinsi NTB.

Laporan ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun tentunya tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mencerminkan kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015.

Mataram, Januari 2016

**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

CHAIRUL MAHSUL
NIP. 195910021985031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	Hal. 1
A. Aspek Strategis Bappeda Provinsi NTB	Hal. 1
B. Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi	Hal. 2
C. Isu Strategis Bappeda Provinsi NTB	Hal. 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Hal. 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Hal. 15
A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB	Hal. 15
B. Realisasi Anggaran	Hal. 28
BAB IV PENUTUP	Hal. 31
LAMPIRAN	
Rencana Kinerja Tahunan 2015	
Penetapan Kinerja tahun 2015	
Pengukuran dan Pencapaian Kinerja	
Laporan Pendukung LAKIP 2015	
Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2015	Hal. 13
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Dokumen yang Memperoleh Penghargaan Ditingkat Nasional	Hal. 19
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Program Prioritas Tahun 2015	Hal. 29

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Target dan Realisasi Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online Hal. 16
- Gambar 3.2 Piala Penghargaan SKPD Terbaik pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 Hal. 18
- Gambar 3.3 Piala Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2015 Hal. 21

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan - keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan – kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder Bappeda Provinsi NTB dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2015 sesuai Rencana Kinerja Tahun 2015 sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) sasaran. Sasaran dalam PK tersebut merupakan sasaran dengan indicator kinerja utama (IKU) yang dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Bappeda Provinsi NTB tahun 2015.

Berdasarkan penilaian pencapaian sasaran tersebut 1 (satu) sasaran tercapai kategori sangat berhasil dan yang lainnya termasuk kategori kurang berhasil. Sasaran yang termasuk kurang berhasil adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas, karena tidak diperolehnya penghargaan Pangripta Nusantara Tahun 2015 terhadap dokumen perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan di Bappeda Provinsi NTB. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2015



(LKjIP)

BAPPEDA PROVINSI NTB

BAB I PENDAHULUAN

A. Aspek Strategis Bappeda Provinsi NTB

Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena dengan skema dan alur perencanaan yang benar pembangunan daerah pada tiap jenjang dapat dievaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam suatu lingkungan wilayah/daerah pada jangka waktu tertentu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB berupaya menerapkan sistem perencanaan yang baik dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel serta mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses menyusun perencanaan tentunya Bappeda terlebih dahulu mengkaji indikator – indikator perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan indikator lainnya.

Dalam melaksanakan tupoksinya, Bappeda melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penyelenggaraan peran dan fungsi Bappeda Provinsi NTB berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut, dijabarkan bahwa peran Bappeda antara lain :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Karena itu sistem perencanaan pembangunan daerah yang diterapkan di Provinsi NTB dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk memudahkan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda didukung dengan adanya peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk melaksanakan tugas dibidang perencanaan pembangunan, Bappeda didukung oleh 112 pegawai negeri sipil, 10 orang pegawai tidak tetap (PTT), 26 orang tenaga kontrak dan 5 orang pejabat fungsional perencana dan 1 orang pejabat fungsional arsiparis dengan tingkat pendidikan yang beragam. Untuk meningkatkan kualitas SDM di Bappeda Provinsi NTB satu orang pegawai saat ini sedang menempuh pendidikan Doktoral di Selandia Baru dan 6 orang mengambil program Master baik di dalam maupun di luar negeri seluruhnya melalui program beasiswa. Dari segi kualitas, Bappeda memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi

Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi NTB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB. Secara administratif Bappeda berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan bertanggungjawab kepada Gubernur NTB melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Bappeda Provinsi NTB adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, pembangunan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan;

- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan rincian tugas dan fungsi Bappeda Provinsi NTB dijabarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

1. Kepala Bappeda

Kepala Bappeda Provinsi NTB mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dibidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan yang bersifat operasional;
- b. Pengarahan dan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Bappeda Provinsi;
- c. Penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang;
- e. Penetapan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perizinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan, pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan personil, pembiayaan sarana dan prasarana Badan pada unit kerjanya;
- h. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiatan Bappeda.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda. Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Program dan Pelaporan

Tugas pokok Subbagian Program dan Pelaporan adalah menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan. Rincian tugas Subbagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- o Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program, dan pelaporan;
- o Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
- o Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
- o Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah:

- o Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- o Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- o Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan;
- o Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- o Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
- o Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan di lingkungan Bappeda.

Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu :

- o Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- o Melaksanakan urusan kepegawaian;
- o Melaksanakan urusan perlengkapan;
- o Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- o Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan, serta kelautan dan perikanan. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan;
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan, pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah – langkah pemecahan permasalahan;
- d. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi :

a. Subbidang Pertanian dan Kelautan

Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Subbidang Pertanian dan Kelautan yaitu:

- Menyusun rencana/program kerja pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan;
- Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
- Monitoring dan evaluasi dibidang pertanian dan kelautan;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbidang Industri dan Keuangan

Subbidang Industri dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha, serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Subbidang Industri dan Keuangan terdiri dari:

- Menyusun rencana/program kerja pembangunan industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha;
- Koordinasi perencanaan pembangunan industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
- Monitoring dan evaluasi di bidang industri dan keuangan;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana

Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kehutanan, serta kebudayaan dan pariwisata. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kehutanan, serta kebudayaan dan pariwisata;
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, yang disusun oleh SKPD satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
- d. Koordinasi perencanaan tata ruang dan wilayah;
- e. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program nasional.

Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana membawahi 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana. Rincian tugas masing-masing subbidang adalah sebagai berikut:

a. Subbidang Prasarana Wilayah

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas lain. Rincian tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah meliputi :

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi di bidang Prasarana Wilayah;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam

Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang dan sumber daya alam serta tugas-tugas lain. Rincian tugas Subbidang Tata Ruang dan Sumberdaya Alam adalah sebagai berikut :

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten/kota serta yang berada dalam wilayah Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
- d. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan pembangunan sosial yang meliputi bidang perlindungan masyarakat, sosial, kesehatan dan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan olahraga, diklat;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:

a. Subbidang Pemerintahan

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pemerintahan dan program ketertiban, pengawasan serta tugas – tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan yaitu:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang Pemerintahan;

- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan dan olahraga, kesejahteraan sosial dan tugas - tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan, penyusunan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi dan statistik serta dokumentasi hasil-hasil pembangunan daerah. Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- b. Penyusunan rencana kerjasama pembangunan lintas Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi pusat data pembangunan Provinsi guna menunjang pelaksanaan pembangunan selanjutnya;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:

a. Subbidang Pengembangan Perencanaan

Subbidang Pengembangan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan tahun pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Perencanaan adalah sebagai berikut:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan perencanaan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka monitoring dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan terdiri dari:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan perencanaan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaporan, pengumpulan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi, pengelolaan pusat data pembangunan Provinsi serta dokumentasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja pembangunan lintas provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data menjadi informasi, pengelolaan pusat data pembangunan provinsi guna menunjang perencanaan pembangunan selanjutnya;
- d. Pengumpulan, penyusunan dokumentasi dan peragaan data statistik hasil pembangunan.

Bidang Statistik terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:

a. Subbidang Pendataan

Subbidang Pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data statistik serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pendataan meliputi:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang Pendataan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbidang Pelayanan Informasi

Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data statistik menjadi bahan informasi, pengelolaan pusat data provinsi dengan memanfaatkan teknologi informatika guna mendukung perencanaan selanjutnya serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi terdiri dari:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang Pelayanan Informasi;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Isu Strategis Bappeda Provinsi NTB

Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah menemui kendala yang tidak sedikit, kendala dan permasalahan tersebut dirangkum dan dirumuskan menjadi isu strategis yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB 2013 – 2018. Diharapkan dalam jangka waktu lima tahun, isu – isu strategis ini dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda. Isu strategis tersebut, antara lain :

- Kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur belum optimal
- Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat
- Dayaguna hasil guna monitoring dan evaluasi pembangunan untuk perencanaan

- Kualitas dokumen rencana pembangunan daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah
- Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat
- Sinergi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan
- Rencana pembangunan berbasis tata ruang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Renstra Bappeda Provinsi NTB tahun 2013 – 2018 termuat 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2018, akan tetapi yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja tahun 2015 hanya 2 (dua) sasaran yang secara langsung mendukung capaian indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018. Sasaran strategis tersebut adalah :

- Tersebaranya data dan informasi pembangunan berbasis web;
- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas.

Rincian indikator kinerja masing – masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersebaranya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	20,000 Orang
2	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	4 Dok

Dalam rangka pencapaian target kedua indikator kinerja diatas, Bappeda telah melaksanakan 6 program strategis dengan 23 kegiatan. Total pagu anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.569.705.800,-. Untuk mencapai sasaran strategis tersebaranya data dan informasi pembangunan berbasis web didukung oleh program sebagai berikut :

- a. Program pengembangan data/informasi dengan kegiatan pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan serta kegiatan serta penyusunan profile daerah.
- b. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan penyusunan rancangan RKPD.

Sedangkan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas, sebagai berikut :

- a. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik; kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD; kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ); kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; kegiatan penyusunan rancangan KUA dan PPAS; kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan; dan kegiatan sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB.
- b. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat dan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
- c. Program perencanaan sosial dan budaya dengan kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra.
- d. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah; kegiatan koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA; dan kegiatan koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation Sistem Management Project II).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB

Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 memuat 20 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja, dari ke 21 indikator kinerja tersebut sebanyak 2 indikator dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online (RKPD Online, NTB Satu Data) serta Dokumen Perencanaan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan yang Berprestasi ditingkat Nasional.

IKU Bappeda menjadi salah satu indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018, sehingga keberhasilan Bappeda dalam mencapai target pada tiap indikator yang telah ditetapkan akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan indikator kinerja RPJMD dimaksud. Di tahun 2015, Bappeda menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat sasaran strategis Tersebar nya Data dan Informasi Pembangunan Berbasis Web serta Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berdaya Guna, dan Laporan Pertanggungjawaban yang Berkualitas.

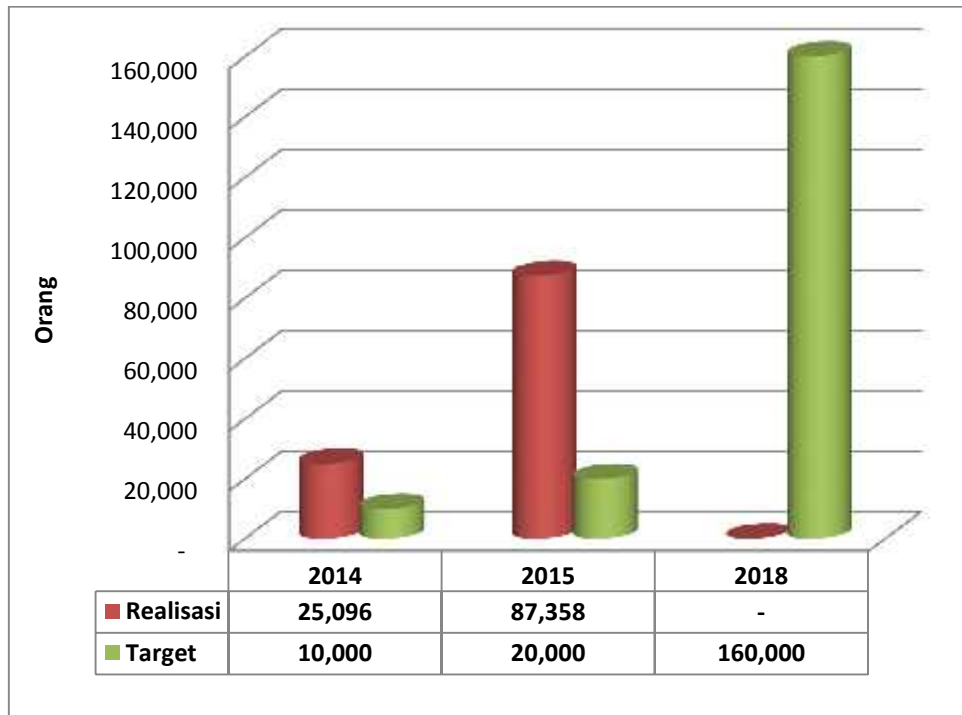
Sasaran Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web

Sasaran strategis yang termuat dalam perjanjian kinerja Bappeda tahun 2015 ini memiliki indikator kinerja Masyarakat yang mengakses layanan NTB Online (RKPD Online, NTB Satu Data) dengan target pengunjung aplikasi online tersebut pada tahun 2014 sebanyak 10.000 orang dan target tahun 2015 sebanyak 20.000 orang, realisasi masing – masing tahun adalah 25.096 orang pada tahun 2014 dan 87.358 orang pada tahun 2015. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah pengunjung yang mengakses layanan NTB Online mencapai 436,79% dan melampaui target.

Tercapainya target capaian indikator kinerja ini merupakan hasil optimalisasi penyebaran informasi dan data perencanaan pembangunan daerah berbasis Web melalui Bale Ite, Website Bappeda Provinsi NTB dan RKPD Online. RKPD Online merupakan sistem perencanaan berjenjang secara online yang dapat diakses oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pengusulan program/kegiatan dan anggarannya, sistem ini juga sudah memberikan wadah bagi masyarakat/dewan untuk mengusulkan aspirasinya. Penggunaan sistem informasi merupakan sebuah jawaban bagi kebutuhan masyarakat masa kini yang menginginkan akses data yang cepat, luas dan terpercaya mengenai pembangunan daerah teraktual.

Gambar 3.1

Target dan Realisasi Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online



Layanan NTB Online dihitung dari jumlah masyarakat yang mengakses RKPD online, website Bappeda Provinsi NTB dan Bale Ite. Ketiga sistem informasi online tersebut memuat data dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

a. Program Pengembangan Data/Informasi

Dua kegiatan dilaksanakan melalui program pengembangan data/informasi yaitu pengumpulan;updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan dengan hasil sebuah peta tematik Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pototano, Pemutakhiran peta spasial potensi wilayah NTB untuk sektor pertanian dan Sistem Informasi Geografis usaha ternak sapi dan kerbau di NTB.

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui program ini adalah Penyusunan Profile Daerah dengan membuat buku saku tentang informasi pembangunan daerah sebanyak 200 buku yang disebarakan untuk masyarakat serta buku profile daerah yang dicetak sebanyak 100 buku.

b. Program perencanaan pembangunan daerah

Dari program perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan kegiatan penyusunan rancangan RKPD, dimana seluruh SKPD Provinsi NTB mengakses dan menyusun Rencana Kerja SKPD melalui RKPD Online sebelum dilakukan pembahasan pada Forum SKPD. Penggunaan sistem informasi pada proses perencanaan pembangunan mempersingkat waktu dan tahapan karena SKPD dan tim asistensi dapat bersama – sama memeriksa progress dari rencana kerja tahun berkenaan. Tahun 2015 sebanyak 10.684 pengunjung mengakses RKPD Online, angka tersebut berasal dari unsur pemerintahan. Melalui kegiatan ini RKPD Perubahan Tahun 2015 dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Gubernur NTB dengan Nomor 18 Tahun 2015 pada tanggal 11 Mei 2015, dan RKPD tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2015.

c. Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah

Program ini merupakan program tambahan yang dimasukkan pada APBD perubahan Bappeda Provinsi NTB tahun 2015 untuk mendorong pencapaian indikator kinerja masyarakat yang mengakses NTB Online. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengolahan data dan informasi daerah yang menghasilkan pemanfaatan Bale Ite sebagai pusat data daerah oleh 7.977 orang di tahun 2015, tersedianya empat hasil kajian yang digunakan sebagai basis data daerah serta dua hasil suvey mengenai Islamic Center (IC) Mataram dalam cita, citra dan ekspektasi publik dan respon masyarakat terhadap program unggulan.

Adapun kajian yang dihasilkan adalah :

- Penelitian arus bangsa dan jasa di NTB,
- Profil Kemiskinan di Perkotaan,
- Kajian Potensi Perikanan dan Kelautan di Provinsi NTB,
- Kajian dampak pariwisata dalam pembangunan daerah

Keberhasilan Bappeda Provinsi NTB dalam memberikan/menyebarkan informasi yang berbasis web telah dibuktikan dengan terpilihnya Bappeda sebagai SKPD terbaik I (atas penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB). Perhargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi.

Gambar 3.2

Piala Penghargaan SKPD Terbaik pada Pemingkatan Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2015



Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas

Sasaran dengan indikator kinerja dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional termasuk dalam indikator kinerja ke 28 dari 31 indikator kinerja pada RPJMD Provinsi NTB tahun 2013 – 2018. Dalam RPJMD terdapat 4 (empat) dokumen yang ditargetkan untuk memperoleh prestasi ditingkat nasional dan Bappeda ditunjuk sebagai penanggung jawab utama pencapaian indikator kinerja tersebut, dokumen – dokumen yang termasuk antara lain dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana penyusunannya dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi NTB sebagai dokumen perencanaan yang dinilai oleh tim dari pusat (Bappenas dan pengamat perencanaan pembangunan) dan diumumkan pada kegiatan Musrenbangnas, dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTB yang dikoordinir oleh Biro Pemerintahan, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi NTB dikoordinir oleh Biro Organisasi serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang

disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB sebagai dokumen pertanggung jawaban.

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Dokumen yang Memperoleh Penghargaan Ditingkat Nasional

Target		Realisasi		2018 (% realisasi 2015 terhadap target tahun akhir Renstra)
2014	2015	2014	2015	
4 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	25 % (target 4 dokumen)
- RKPD	- RKPD	- RKPD	- LKPD	
- LPPD	- LPPD	- LPPD		
- LKjIP	- LKjIP	- LKPD		
- LKPD	- LKPD			

Dokumen yang berhasil meraih prestasi di tahun 2015 adalah dokumen LKPD. Pemerintah Provinsi NTB meraih Opini WTP pada tahun 2015 atas LKPD tahun 2014, dan prestasi ini berhasil dipertahankan selama 4 (empat) tahun berturut – turut sejak 2011. Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh BPK terhadap LKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut : laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP), sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *Cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas Aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Pada tahun 2015 terdapat 7 komponen LKPD yang disajikan (berbasis akrual) : Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dimulainya penggunaan basis akrual ini menjadi permasalahan tersendiri di tahun 2015 karena masih banyak penyesuaian dalam perhitungan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi NTB, pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen

kepemilikan yang sah. Diharapkan pada tahun mendatang permasalahan ini sudah dapat teratasi dengan koordinasi yang dilakukan untuk pencatatan aset daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LPPD wajib dilaporkan kepada daerah kepada pemerintah setiap tahunnya sebagai potret penyelenggaraan pemerintah daerah pada aspek manajemen pemerintahan dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun. Evaluasi LPPD dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB dan BPKP untuk memperoleh gambaran kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan publik, baik pada level pengambil kebijakan sampai level pelaksana kebijakan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 120-4761 tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013, Provinsi NTB menempati urutan ke 9 dari 33 provinsi dengan skor 2,5953 selisih 0,4566 dengan Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi pertama. Dokumen LPPD akan kembali dievaluasi pada tahun 2016.

Dokumen LKjIP disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dokumen ini dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN dan RB dengan tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas *outcome* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pada tahun 2015 Pemprov NTB memperoleh nilai 58,65 atau predikat CC meningkat, sehingga walaupun cukup memadai penyelenggaraan pemerintahan di NTB memerlukan beberapa perbaikan.

Komponen yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Dari sisi perencanaan kinerja hasil evaluasi menunjukkan Pemprov NTB telah mengimplementasikan Sistem Perencanaan Kinerja melalui penetapan RPJMD periode 2013 – 2018, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Adapun rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut, Pemprov NTB dan unit kerja menyusun rencana aksi atas kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan target – target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja.

Bappeda memiliki satu dokumen yang ditargetkan untuk berprestasi ditingkat nasional yaitu RKPD, target ini juga tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi NTB tahun 2013 – 2018.

Pada tahun 2014 Pemprov NTB melalui Bappeda memperoleh penghargaan Pangripta Nusantara dari Menteri PPN/Bappenas karena sebagai Provinsi terbaik ke 3 kategori B dinilai menghasilkan dokumen perencanaan (RKPD) yang berkualitas, sedangkan pada tahun 2015 penghargaan tersebut tidak diperoleh kembali karena dokumen RPJMD yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sedang direview untuk diselaraskan dengan dokumen RPJMN sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang – undangan yang berlaku.

Walaupun pada dasarnya RKPD 2015 NTB yang dinilai oleh Tim sudah diselaraskan dengan RKP bahkan dalam prosesnya juga sudah disesuaikan dengan Rancangan RKP dalam rangka mengawal prioritas nasional yang terkait dengan pembangunan di Provinsi NTB. Akan tetapi Pemprov NTB berhasil masuk menjadi salah satu dari 12 finalis Provinsi se Indonesia yang dinilai oleh Tim dari Bappenas, dan rekomendasi Bappeda Provinsi NTB untuk Kabupaten Lombok Utara membuahkan hasil Anugrah Pangripta Nusantara setelah melalui empat tahapan proses seleksi diantaranya : Penilaian Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota tahun 2015, Penilaian Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan, penilaian Dokumen RKPD oleh Tim Penilai Pusat dan Penilaian Prestasi dan Wawancara Kepala Bappeda Kabupaten/Kota oleh Tim pusat. Dari 33 Kabupaten/Kota se Indonesia yang dinilai oleh Tim Jury independen yang dibentuk Bappenas RI, lalu mengerucut menjadi 12 Kabupaten/Kota, dimana KLU ada di dalamnya sebagai salah satu penerima Penghargaan Pangripta tersebut.

Ditahun 2016, agar terciptanya keselarasan dengan kebijakan nasional yang mengalami perubahan Bappeda Provinsi NTB akan merevisi RPJMD Provinsi NTB. Hal ini mempengaruhi penyusunan dokumen perencanaan tahun 2017 seluruh SKPD lingkup Provinsi NTB mengacu RPJMD hasil revisi agar tercipta keselarasan dengan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan sehingga harapan pada tahun mendatang NTB kembali mendapatkan penghargaan Pangripta Nusantara.

Meskipun tidak memperoleh Pangripta Nusantara, Bappeda mampu mempertahankan prestasi nasional melalui dokumen pertanggung jawaban hasil pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan hasil koordinasi dengan seluruh SKPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bentuk koordinasi dilakukan melalui rapat evaluasi capaian indikator MDGs yang dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 2015, penyusunan dokumen database indikator capaian target MDGs di Provinsi NTB yang dicetak sebanyak 25 buku dan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2015 dituangkan dalam laporan tahunan pencapaian MDGs di Provinsi NTB.

Gambar 3.3

Piala Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2015



Tercapainya indikator MDGs Provinsi NTB sepanjang tahun 2013, 2014 dan 2015 merupakan hasil dari terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi dan seluruh stakeholder serta masyarakat, sehingga selama tiga tahun berturut – turut Pemerintah Provinsi NTB mampu mempertahankan penghargaan tersebut. Provinsi NTB memiliki tujuh tujuan MDGs yang harus dicapai sampai dengan tahun 2015, tujuan tersebut antara lain :

- Tujuan 1 Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
- Tujuan 2 Mencapai pendidikan dasar untuk semua
- Tujuan 3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- Tujuan 4 Menurunkan angka kematian anak
- Tujuan 5 Meningkatkan kesehatan ibu
- Tujuan 6 Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
- Tujuan 7 Memastikan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai ketujuh tujuan tersebut dibutuhkan koordinasi lintas sektor, karena berbagai pihak memiliki peranan tersendiri yang harus disinkronkan satu sama lain. Dan disinilah peranan Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, menyandingkan

seluruh pihak agar dapat menjalankan peranannya beriringan untuk mencapai tujuan yang sama.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional dari sasaran strategis tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggung jawaban yang berkualitas, antara lain :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan dimana pelaksanaannya dikoordinasikan Sekretariat dan Bidang Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan yang dilaksanakan sekretariat yaitu pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik hasil kegiatan ini merupakan langkah awal dari proses perencanaan pembangunan di daerah melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Kepala Bappeda sebanyak 2 (dua) kali di awal dan akhir tahun untuk memformulasikan rencana program dan kegiatan Kabupaten/Kota se-NTB yang akan ditindaklanjuti pada Forum SKPD Provinsi NTB. Dalam upaya optimalisasi perencanaan pembangunan daerah sebelum pelaksanaan kegiatan Forum SKPD, Bappeda mengawali proses melalui tahap Pra Forum SKPD yang diharapkan pada tahap ini SKPD memahami peran masing – masing dalam mencapai target indicator kinerja RPJMD. Sehingga dalam Forum SKPD lingkup Provinsi NTB program/kegiatan SKPD dapat diselaraskan dan tercapai sinergitas antar program/kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Februari 2015, setelah itu dilaksanakan Sarasehan Pembangunan NTB tahun 2016 dengan mitra pembangunan yang berjumlah 130 orang. Sarasehan pembangunan ini dilaksanakan untuk menjangring masukan dan usulan dari masyarakat NTB yang diwakili oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, LSM dalam maupun luar negeri, pihak swasta dan lain sebagainya.

Selanjutnya dilaksanakan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD tahun 2015 dalam rangka penyusunan RKPD 2016 melalui kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Dari seluruh proses kegiatan tersebut dihasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB yang memuat program/kegiatan Pemerintah Provinsi NTB. Sebagai apresiasi kepada daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan baik tahapan proses dan inovasi sampai dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas. Penghargaan Pangripta Nusantara bagi daerah yang dokumen perencanaannya

dinilai baik dan inovatif yang diumumkan pada acara Musrenbang Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas,

Kegiatan lainnya yang berkontribusi untuk pencapaian indikator ini adalah monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan keluaran berupa dokumen evaluasi RKPD, KUA PPAS dan DPA SKPD Tahun 2015, Laporan/dokumen pemetaan program kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian 31 dan laporan hasil monitoring ke Kabupaten/Kota. Ketiga dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu bahan tim asistensi anggaran untuk mengevaluasi usulan program/kegiatan dari SKPD dan Kabupaten/Kota pada tahun mendatang.

Kegiatan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan Tahun 2015, rancangan KUA PPAS Tahun 2016 dan Perubahan Tahun 2015, penyusunan dokumen perencanaan (laporan tahunan, rencana kerja tahun 2016, dokumen RKA 2016 dan RKA Perubahan Tahun 2015 Bappeda), serta kegiatan sinkronisasi dokumen RPJMD Provinsi NTB dengan melakukan review RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018 juga memiliki peranan untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang berkualitas, selain itu disusunnya Rancangan Perda Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu melalui kegiatan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah Bappeda untuk menetapkan sebuah standar pada proses perencanaan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan setiap proses perencanaan pemerintah daerah Provinsi NTB.

Program perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mencapai dokumen perencanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional, meskipun tahun ini dokumen perencanaan belum memperoleh penghargaan dimasa mendatang akan ditingkatkan dengan menyelaraskan dokumen perencanaan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat SKPD di lingkup Provinsi NTB.

b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini mendukung pencapaian tujuan pertama MDGs di Provinsi NTB dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat dengan keluaran berupa sinkronisasi program kegiatan pertanian dan kelautan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat, rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait dimana dari hasil rapat yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali tersebut disimpulkan

bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan antara lain belum efektif dan optimalnya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, begitu juga dengan belum optimalnya aspek kebijakan makro, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bagi ibu dan anak. Untuk itu pendekatan ekonomi kelembagaan merupakan salah satu cara yg dapat dilakukan serta dengan mengoptimalkan peran dan fungsi TKPKD.

Selain itu dilaksanakan juga bimbingan teknis Pro Poor Planning and Budgeting Monitoring (P3BM) yang diisi 2 orang instruktur dari Bappenas untuk 40 orang yang fokus menanggulangi akar masalah kemiskinan melalui proses partisipatif dengan memahami, mengidentifikasi, mengukur serta memetakan kemiskinan dimana dari hasil bimtek diharapkan peserta dapat menentukan fokus prioritas lokasi, target, intervensi sustainable development yang sesuai dengan karakter lokal wilayah. Untuk memetakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB disusun sebuah dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD), dokumen laporan tahunan DBHCHT Provinsi NTB berikut rapat koordinasi DBHCHT yang dilaksanakan 2 (dua) kali pada tahun 2015, dan peta jalan pengembangan komoditi unggulan daerah Provinsi NTB.

Bappeda juga melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, hasil dari kegiatan ini antara lain koordinasi di bidang industri dan keuangan, adanya database indikator capaian target MDGS di Provinsi NTB, Rapat evaluasi capaian indikator MDGs, Laporan tahunan pencapaian MDGs di Provinsi NTB, Buku (laporan) pelaksanaan Kelompok Ekonomi Kreatif Provinsi NTB, sebuah Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri PUD, serta koordinasi PNPM PISEW dengan 4 kabupaten penerima BLM antara lain Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

Untuk mengkoordinasikan peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan rapat Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebanyak 2 kali bersama 60 orang dari SKPD dan stakeholder terkait, dari koordinasi ini dibahas mengenai pengembangan komoditi tebu di kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dimana nantinya akan dikembangkan pabrik gula untuk mendukung program swasembada gula nasional terutama wilayah timur dengan target 750 ribu ton per tahun.

NTB memiliki beberapa kawasan ekonomi khusus dan ditahun 2015 dilakukan pembagian koordinasi dimana KEK Mandalika oleh Bappeda pada Bidang Ekonomi, KEK Global

Hub oleh Biro Perekonomian, KEK Samota oleh Biro Kerjasama. Untuk mendorong percepatan perwujudan KEK Mandalika dilaksanakan rapat sebanyak 7 kali yang secara keseluruhan dihadiri 210 orang dari SKPD terkait serta stakeholder dengan kesimpulan dari pertemuan tersebut yaitu Master Plan pengembangan KEK Mandalika yg akan dikelola ITDC sudah selesai dan akan dibuat perda dan jalan akses sepanjang 4 km telah dilaksanakan dan pengerjaan jalan lingkungan sepanjang 8 km dilaksanakan kemudian.

Dari penjabaran hasil kegiatan diatas, peranan program pembangunan ekonomi untuk mencapai indikator kinerja sasaran dimaksud cukup besar karena koordinasi yang dilaksanakan untuk mengawal keselarasan program/kegiatan dibidang industri, keuangan, pertanian dan kelautan dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.

c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Melalui program ini dilakukan 2 (dua) kegiatan, yaitu koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan koordinasi perencanaan pembangunan sosial bidang kesra. Hasil kedua kegiatan ini adalah adanya koordinasi program/kegiatan bidang pemerintahan dan sosial untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras antara RPJMD, Renstra SKPD dan RKA SKPD mitra bidang Sosial serta penyelarasan dokumen perencanaan bidang sosial di Bappeda kabupaten/kota se NTB, evaluasi capaian kinerja SKPD mitra bidang sosial, Peraturan Gubernur tentang Bale Mediasi.

Untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat luas dilakukan rapat koordinasi pemerataan akses air bersih/air minum se Provinsi NTB sebanyak 1 kali yang diikuti 90 orang peserta dengan hasil adanya kesepakatan bahwa daerah rawan air bersih yang ada di 10 kabupaten/kota akan diintervensi lebih kuat oleh pemerintah provinsi bersama dengan LSM dalam maupun luar negeri yang memiliki focus pada program air bersih dan sanitasi, serta Tim Pokja AMPL akan secara lebih intensif melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program AMPL di provinsi NTB, dan juga Pemerintah Provinsi NTB dan lembaga donor seperti YMP, Islamic Relief, Pamsimas, STMBM dan lain sebagainya akan mendorong lembaga pengelola air bersih/minum di tingkat desa untuk penguatan dan peningkatan kelembagaan menjadi Bumdes/Pamdes. Selanjutnya program AMPL akan segera didukung dengan adanya Peraturan Daerah tentang pemerataan akses air bersih.

Sebagai bentuk dukungan untuk mencapai MDGs tujuan kedua mencapai pendidikan dasar untuk semua, Bappeda menyusun sebuah roadmap generasi emas NTB 2025 dengan

visi ingin mewujudkan lahirnya manusia NTB yang bertakwa cerdas, sehat dan produktif ditahun 2025 dengan 2 misi, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak di NTB serta memberikan pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan bagi anak – anak NTB. Adapun intervensi yang dilakukan adalah berkoordinasi untuk pembentukan desa GEN dan pasangan ramah anak (PARANA), pemantapan pelaksanaan GEN di desa, penguatan institusi pelayanan dasar (sekolah dan posyandu), muatan peran keluarga untuk melahirkan anak – anak yang cerdas dan pintar, mengeluarkan regulasi untuk mendukung GEN, program kesehatan reproduksi remaja dan lain – lain.

Selain itu Bappeda juga menyusun dokumen gugus tugas program PAUDHI untuk mengimplementasikan PP Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, dengan *goal* untuk melahirkan SDM yang sehat, cerdas, produktif, intelektual dan mencintai NTB yang diintervensi sejak janin s.d usia 6 tahun. Terselenggaranya layanan PAUDHI menuju anak NTB yg cerdas, ceria, sehat dan akhlak mulia dengan mengacu pada pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, berkesinambungan, non diskriminasi, terjangkau oleh kelompok masyarakat, dan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya partisipasi masyarakat berbasis budaya yang konstruktif. Indikator keberhasilan program ini adalah adanya PAUD, BKB, Posyandu dalam satu desa/pelaksanaan PAUDHI.

d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tiga kegiatan dilaksanakan melalui program ini, kegiatan pertama yaitu koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang dilaksanakan sebanyak 6 kali untuk menyelaraskan program/kegiatan SKPD mitra dengan dokumen perencanaan di atasnya dan melakukan identifikasi pelayanan air bersih di Provinsi NTB yang dituangkan kedalam sebuah dokumen.

Kegiatan kedua adalah koordinasi perencanaan tata ruang dan SDA sebagai bentuk dukungan MDGs tujuan ketujuh memastikan kelestarian lingkungan hidup, dengan melaksanakan koordinasi antara tim BKPRD sebanyak 9 kali ditahun 2015 yang membahas terkait rekomendasi pemanfaatan ruang untuk pemerintah, swasta dan masyarakat serta pembahasan RTR, KSP dan RDTR Kabupaten/kota. Penyusunan Rancangan Perda KSP Agropolitan Alas Utan yang dilanjutkan dengan konsultasi publik, juga dilakukan seminar dan sosialisasi Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia dan Tambora sebagai Geopark Nasional. Dan untuk mendukung Rinjani sebagai Geopark Dunia disusun sebuah dokumen rencana induk pengembangan geopark rinjani.

Untuk mendukung tujuan MDGs ini, dilaksanakan juga rapat koordinasi program compact kemakmuran hijau sebanyak 3 kali dan dihadiri 105 orang yang dilakukan untuk integrasi program MCAI/kemakmuran hijau untuk pengelolaan SDA berbasis masyarakat, pembangunan low carbon/energi baru terbarukan, peningkatan ekonomi masyarakat lokal yang diimplementasikan di Provinsi NTB serta 3 kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara)

Terobosan dan inovasi yang telah dilakukan Bappeda ditahun 2015 antara lain :

1. Bekerjasama dengan BPS dan perguruan tinggi dalam rangka penyediaan basis data analisis data baseline perencanaan dengan mengeluarkan 7 kajian dari BPS dan 2 kajian universitas.
2. Melaksanakan Pra Forum SKPD dengan menghadirkan Sekretaris dan Kasubbag Program untuk berdiskusi dengan SKPD terhadap usulan yang bersifat strategis.
3. Melaksanakan Sarasehan Perencanaan Pembangunan dengan mengundang 100% stakeholder non-pemerintah.

B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015 untuk mendukung kedua sasaran strategis yang telah diperjanjikan maka dilaksanakan 6 (enam) program dengan 21 (duapuluh satu) kegiatan, dan untuk maksimalnya pencapaian target indikator kinerja maka pada anggaran perubahan Bappeda menambahkan 1 (satu) program serta 2 (dua) kegiatan yaitu program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan pengolahan data dan pelayanan informasi daerah dan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan DBHCHT.

Melalui APBD murni 6 (enam) program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 6.569.705.800,- dan pada APBD Perubahan dengan dianggarkannya Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah serta kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT pada program Perencanaan Pembangunan Ekonomi anggaran Bappeda menjadi Rp. 8.354.843.700,- sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi keuangan untuk 7 (tujuh) program tersebut mencapai Rp. 7.255.867.752,-. Untuk lebih lengkapnya, realisasi keuangan dan fisik untuk masing – masing program dan kegiatan prioritas Bappeda pada tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program Prioritas Tahun 2015

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		
	2015	2015	KEUANGAN		Fisik (%)
	(Murni)	(Perubahan)	(Rp)	%	
Program Pengembangan Data / Informasi	206,900,000	152,620,000	142,269,400	93.22	100.00
Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	172,450,000	117,750,000	110,399,400	93.76	100.00
Penyusunan Profile Daerah	34,450,000	34,870,000	31,870,000	91.40	100.00
Program Kerjasama Pembangunan	566,200,000	703,930,000	660,860,000	93.88	100.00
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	566,200,000	703,930,000	660,860,000	93.88	100.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,593,666,000	2,657,411,000	2,316,668,650	87.18	100.00
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public	448,748,000	416,721,000	394,427,650	94.65	100.00
Penyusunan Rancangan RKPDP	179,950,000	183,050,000	158,420,000	86.54	100.00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	618,358,000	595,200,000	556,670,000	93.53	100.00
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50,125,000	50,125,000	45,325,000	90.42	100.00
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	138,710,000	138,710,000	137,774,000	99.33	100.00
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	159,200,000	205,605,000	177,195,000	86.18	100.00
Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	190,000,000	198,000,000	156,998,000	79.29	100.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan	584,075,000	538,450,000	437,700,000	81.29	100.00
Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108,500,000	103,500,000	54,534,000	52.69	100.00
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	37,650,000	68,250,000	50,450,000	73.92	100.00
Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB	78,350,000	159,800,000	147,175,000	92.10	100.00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	621,372,000	1,269,780,000	1,192,398,830	93.91	100.00
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	253,275,000	241,600,000	219,050,000	90.67	100.00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	368,097,000	265,240,000	247,490,000	93.31	100.00
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	-	762,940,000	725,858,830	95.14	100.00
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	462,665,000	469,874,900	435,506,900	92.69	100.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	205,000,000	196,560,000	180,570,000	91.87	100.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	257,665,000	273,314,900	254,936,900	93.28	100.00

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		
	2015	2015	KEUANGAN		Fisik (%)
	(Murni)	(Perubahan)	(Rp)	%	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	2,118,902,800	2,537,437,800	2,024,388,422	79.78	98.50
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	170,580,000	376,580,000	356,258,000	94.60	100.00
Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	717,840,000	930,375,000	780,583,613	83.90	98.80
Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation Sistem Management Project II)	1,230,482,800	1,230,482,800	887,546,809	72.13	97.82
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	-	563,790,000	483,775,550	85.81	100.00
Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah	-	563,790,000	483,775,550	85.81	100.00
Total	6,569,705,800	8,354,843,700	7,255,867,752		

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi NTB untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2013 – 2018 dan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015, Bappeda berhasil mencapai indikator kinerja masyarakat yang mengakses layanan NTB Online sebanyak 87.358 orang dari target 20.000 orang ditahun 2015 yang terdiri dari akses RKPD Online dan NTB Satu Data (website Bappeda Provinsi NTB dan Bale Ite). Sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran Bappeda agar data dan informasi pembangunan tersebar dengan basis web berhasil karena tingginya animo masyarakat yang mengakses media online tersebut. Keberhasilan Bappeda Provinsi NTB untuk penyebaran informasi berbasis web telah dibuktikan dengan terpilihnya Bappeda sebagai SKPD terbaik I (atas penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB) sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi.

Sasaran kedua yang diperjanjikan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas dengan indikator kinerja dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional. Dengan target 4 (empat) dokumen ditahun 2015, 1 (satu) dokumen berhasil mencapai prestasi yaitu LKPD yang disusun oleh BPKAD Provinsi NTB. Bappeda sebagai SKPD penanggungjawab utama indikator kinerja tersebut, akan berupaya meningkatkan sisi perencanaan untuk mendukung tercapainya keberhasilan RKPD, LPPD dan LKjIP dengan meningkatkan sinkronisasi antar dokumen perencanaan mulai dari menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN dan RPJPD, menyelaraskan Renstra dengan RPJMD dan menyelaraskan RKPD dengan Renstra dan RPJMD Provinsi NTB agar berhasil memperoleh penghargaan ditingkat nasional. Akan tetapi Bappeda berhasil memperoleh penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2015 serta .

Pada tahun mendatang Bappeda akan membuat kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota diwakili oleh Kepala Bappeda masing – masing, dalam bentuk perjanjian kerjasama terkait perencanaan dan penganggaran isu – isu strategis di NTB sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	20,000 Orang
2	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	2 Dok

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program pengembangan data/informasi	Rp 206,900,000.00	APBD, Sasaran 1 & IK RPJMD 14
2 Program kerjasama pembangunan	Rp 566,200,000.00	APBD, IK RPJMD 5,7
3 Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 2,593,666,000.00	APBD, Sasaran 1,2 & IK RPJMD 14,28
4 Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 621,372,000.00	APBD, Sasaran 2 & IK RPJMD 5,7,9,28
5 Program perencanaan sosial dan budaya	Rp 462,665,000.00	APBD, Sasaran 2 & IK RPJMD 28
6 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rp 2,118,902,800.00	APBD, Sasaran 2 & IK RPJMD 15, 28

Mataram, 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI

CHAIRUL MAHSUL
Pembina Utama Madya
NIP. 19591002 198503 1 010

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 **Nama Organisasi** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB
- 2 **Tugas** : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
- 3 **Fungsi** : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan
 b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
 d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan
 e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4 **Indikator Kinerja Utama** :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu data)	<p>Formulasi pengukuran : jumlah masyarakat yang mengakses NTB online tahun sebelumnya * 200%</p> <p>Tipe penghitungan target : absolut</p> <p>Sumber data : Laporan Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB</p> <p>Alasan : untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap data rencana dan hasil pembangunan daerah</p>
2	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdayaguna, selaras antar sektor dan antar wilayah	Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	<p>Formulasi pengukuran : jumlah dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang dilombakan ditingkat nasional - jumlah dokumen perencanaan yang tidak berprestasi ditingkat nasional</p> <p>Tipe penghitungan target : absolut</p> <p>Sumber data : Laporan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi NTB</p> <p>Alasan : untuk mendorong tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas</p>

Mataram, Agustus 2014
 KEPALA BAPPEDA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

CHAIRUL MAHSUL
 NIP. 19591002 198503 1 010

LAMPIRAN
PENGUKURAN & PENCAPAIAN
KINERJA

Lampiran Lakip

PENGUKURAN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja/SKPD
Tahun Anggaran

: BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
: 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	Anggaran			Fisik
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	%
Terkelolanya basis data spasial daerah	Persentase penanganan data spasial daerah	%	40	38	93.75	Program pengembangan data/informasi	152,620,000	142,269,400	93.22	100.00
						1 Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	117,750,000	110,399,400	93.76	100.00
						5 Penyusunan Profile Daerah	34,870,000	31,870,000	91.40	100.00
Tersebarannya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	Orang	20,000	87,358	436.79	Program pengembangan data/infomasi/statistik daerah	563,790,000	483,775,550	85.81	100.00
						5 Pengolahan data dan pelayanan informasi daerah	563,790,000	483,775,550	85.81	100.00
Tersedianya data yang akurat, selaras, mutakhir dan akuntabel	Persentase data pembangunan daerah yang diselenggarakan	%	37	37	100.566	Program kerjasama pembangunan	703,930,000	660,860,000	93.88	100.00
						3 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	703,930,000	660,860,000	93.88	100.00
						Program perencanaan pembangunan daerah	2,657,411,000	2,316,668,650	87.18	100.00
Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat	Persentase partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan daerah	%	40	40	100	1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	416,721,000	394,427,650	94.65	100.00
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, selaras antar sektor dan antar wilayah	Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	Dok	4	1	25	8 Penyusunan Rancangan RKPD	183,050,000	158,420,000	86.54	100.00
	Ketepatan penyelesaian dokumen/laporan :					9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	595,200,000	556,670,000	93.53	100.00
	- KUA/PPAS murni	Bulan	4	4	100					
	- KUA/PPAS perubahan		4	4						
	- LKPJ		3	3						

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	Anggaran			Fisik
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	%
Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas	Penyelesaian dokumen/laporan : - DPA SKPD - LAKIP	Bulan	2	2	100	11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50,125,000	45,325,000	90.42	100.00
			1	1		12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	138,710,000	137,774,000	99.33	100.00
						13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	205,605,000	177,195,000	86.18	100.00
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	%	90	96.45	107.167	14 Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	198,000,000	156,998,000	79.29	100.00
						15 Penyusunan Dokumen Perencanaan	538,450,000	437,700,000	81.29	100.00
						16 Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	103,500,000	54,534,000	52.69	100.00
						21 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	68,250,000	50,450,000	73.92	100.00
						22 Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB	159,800,000	147,175,000	92.10	100.00
Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan	Persentase komoditi unggulan daerah yang dikembangkan	%	32	40.91	127.844	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1,269,780,000	1,192,398,830	93.91	100.00
Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)	Persentase rencana program industri kreatif yang dikembangkan	%	9.2	15.9	172.826	3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	241,600,000	219,050,000	90.67	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	Anggaran			Fisik
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	%
Tercapainya tujuan dan sasaran MDGs di Provinsi NTB	Dokumen hasil kegiatan pendukung MDGs	Dok	1	1	100	4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	265,240,000	247,490,000	93.31	100.00
						10 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan DBHCHT	762,940,000	725,858,830	95.14	100.00
Terwujudnya rencana pemerintahan yang bersih dan melayani	Persentase rencana program pemerintahan yang bersih dan melayani	%	52.2	100	191.571	Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya	469,874,900	435,506,900	92.69	100.00
Tersedianya pelayanan sosial dasar yang berkualitas	Persentase rencana program pelayanan sosial dasar strategis daerah	%	69	100	144.928	5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	196,560,000	180,570,000	91.87	100.00
						8 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	273,314,900	254,936,900	93.28	100.00
Terwujudnya konektivitas infrastruktur antar wilayah	Persentase rencana program infrastruktur strategis daerah	%	72.67	72.37	99.59	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2,537,437,800	2,024,388,422	79.78	98.87
Terwujudnya sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah	Persentase rencana tata ruang Kab/Kota yang diselaraskan dengan rencana tata ruang provinsi: - RDTR	%	24	14	58.33	7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	376,580,000	356,258,000	94.60	100.00
Tersedianya rencana pengelolaan SDA dan mitigasi adaptasi bencana	Persentase rencana program rehabilitasi hutan & lahan, RTH dan pengelolaan bencana	%	28.18	46	163.236	8 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	930,375,000	780,583,613	83.90	98.80
						10 Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	1,230,482,800	887,546,809	72.13	97.82

LAMPIRAN
LAPORAN PENDUKUNG

LAPORAN PENDUKUNG LAKIP 2015

a. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2013 - 2018

SKPD / Unit Kerja : BAPPEDA PROVINSI NTB
Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		% CAPAIAN		PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		% CAPAIAN		% FISIK
		2014	2015	2014	2015	TERHADAP TH 2014	TERHADAP TARGET TH 2015		2014	2015	2014	2015	TERHADAP TH 2014	TERHADAP TARGET TH 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 6:5X100%	(8) 6:4X100%	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) 13:12X100%	(15) 13:11X100%	(16)
Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	10,000 org	20,000 org	25,096 org	87,358 org	348.10	436.79	Program pengembangan data/informasi	142,269,400	152,620,000	255,764,500	142,269,400	55.63	93.22	100%
								Program perencanaan pembangunan daerah	703,930,000	2,657,411,000	3,408,483,115	2,316,668,650	67.97	87.18	100%
								Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	-	563,790,000	-	483,775,550	-	85.81	100%
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggung jawaban yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	4 dok	4 dok	3 dok	1 dok	33.33	25	Program perencanaan pembangunan daerah	2,657,411,000	2,657,411,000	3,408,483,115	2,316,668,650	67.97	87.18	100%
								Program perencanaan pembangunan ekonomi daerah	615,187,198	1,269,780,000	602,582,350	1,192,398,830	197.88	93.91	100%
								Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya	634,814,000	469,874,900	559,624,800	435,506,900	77.82	92.69	100%
								Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA	2,381,621,179	2,537,437,800	2,242,684,409	2,024,388,422	90.27	79.78	99%

b. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET RPJMD

- Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan berbasis Web, Bappeda Provinsi NTB melalui Bale Ite lebih mengoptimalkan data dan informasi Pembangunan Daerah melalui Website Bappeda Provinsi NTB.
- Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan berprestasi ditingkat nasional, Bappeda berupaya lebih mengoptimalkan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan Provinsi NTB dengan RPJMN, RPJPD, RPJMD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku

c. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET RPJMD

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan Permasalahan	Upaya Kedepan Untuk Meningkatkan Kinerja SKPD
1	Penghargaan untuk dokumen perencanaan tidak diperoleh pada tahun 2015 karena RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018 belum direview berdasarkan RPJMN	Pada tahun 2015 dan 2016 Bappeda melakukan sinkronisasi dokumen RPJMD dengan RPJMN	Dimasa mendatang Bappeda akan berupaya untuk lebih cepat melakukan review dokumen perencanaan di daerah apabila terjadi perubahan pada dokumen perencanaan diatasnya

d. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2015

**PIALA PENGHARGAAN PROVINSI TERBAIK DALAM PENCAPAIAN SASARAN
TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs) TAHUN 2015**



LAMPIRAN
RENSTRA

LAPORAN PENDUKUNG LAKIP 2015

a. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2013 - 2018

SKPD / Unit Kerja : BAPPEDA PROVINSI NTB
Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		% CAPAIAN		PROGRAM	TARGET/ ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		% CAPAIAN		% FISIK
		2014	2015	2014	2015	TERHADAP TH 2014	TERHADAP TARGET TH 2015		2014	2015	2014	2015	TERHADAP TH 2014	TERHADAP TARGET TH 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 6:5X100%	(8) 6:4X100%	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) 13:12X100%	(15) 13:11X100%	(16)
Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	10,000 org	20,000 org	25,096 org	87,358 org	348.10	436.79	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	142,269,400	563,790,000	255,764,500	483,775,550	189.15	85.81	100%
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggung jawaban yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	2 dok	2 dok	2 dok	1 dok	50	50	Program perencanaan pembangunan daerah	2,657,411,000	2,657,411,000	3,408,483,115	2,316,668,650	67.97	87.18	100%

b. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET RPJMD

1. Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan berbasis Web, Bappeda Provinsi NTB melalui Bale Ite lebih mengoptimalkan data dan informasi Pembangunan Daerah melalui Website Bappeda Provinsi NTB.
2. Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan berprestasi ditingkat nasional, Bappeda berupaya lebih mengoptimalkan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi NTB dengan RPJMN, RPJPD, RPJMD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku

c. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET RPJMD

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan Permasalahan	Upaya Kedepan Untuk Meningkatkan Kinerja SKPD

d. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Foto piagam penghargaan